

## BAB II

### SEJARAH *WOMENOMICS* DAN KESETARAAN GENDER DI JEPANG

Pada bab ini penulis akan menjelaskan gambaran mengenai sejarah munculnya *Womenomics* di Jepang, proses kebijakan *Abenomics* ke *Womenomics* seperti *Abenomics*: reformasi struktural pertumbuhan ekonomi, strategi Shinzo Abe untuk *Womenomics*. Pada bab ini penulis juga menjelaskan gender, kesetaraan gender, munculnya gagasan gender di Jepang, norma kesetaraan gender, *Womenomics* seperti *Womenomics* dan bisnis, *Womenomics* dan mendorong perempuan untuk bersinar. Selanjutnya penulis juga akan menjelaskan peran wanita dalam masyarakat Jepang, status dan isu kemajuan politik perempuan di Jepang tahun 2022.

#### 2.1 Sejarah Kemunculan *Womenomics* di Jepang

Jepang adalah salah satu negara yang dikenal dengan adanya tradisi terhadap gender yang hierarkis dan patriarkis di mana perempuan di Jepang sangat dibedakan dengan laki-laki pada sektor ranah publik sehingga agar kontribusi perempuan di Jepang setara dengan laki-laki, pada tahun 2012 perdana Menteri Shinzo Abe mengadopsi kebijakan *Womenomics* yang diciptakan oleh Kathy Matsui di tahun 1999.

Jepang adalah salah satu negara dengan ekonomi maju dan mempunyai pengaruh besar terhadap ekonomi politik internasional. Tahun 1990-an adalah periode stagnasi ekonomi di Jepang, dengan pertumbuhan PDB per kapita hanya sekitar 0,5% per tahun dari tahun 1991 hingga 2000. Pada bulan Agustus 1999, sekelompok ahli strategi investasi dari Goldman Sachs Jepang, termasuk ahli strategi yang berbasis di Tokyo seperti Kathy Matsui, Hiromi Suzuki dan Yoko Ushio yang dipimpin oleh Kathy Matsui, mengadopsi istilah *Womenomics* di mana ekonomi pada wanita dapat menguraikan strategi yang direkomendasikan untuk merevitalisasi ekonomi stagnan Jepang dengan mengurangi kesenjangan pekerjaan gender dan mempromosikan penggunaan sumber daya manusia yang lebih baik melalui kesetaraan

di tempat kerja (<https://www.goldmansachs.com/our-firm/history/moments/1999-womenomics.html>).

Sejak laporan tersebut diterbitkan pada tahun 1999, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita Jepang telah meningkat hingga mencapai rekor 71% dan melampaui AS dan Eropa. Pemerintah Jepang juga telah memperkenalkan skema cuti melahirkan. Istilah dan konsep *Womenomics* telah menarik perhatian Pemerintah Jepang dan akan diadopsi sebagai pilar utama reformasi yang ditujukan untuk merevitalisasi ekonomi di bawah Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2012.

*Womenomics* merupakan gagasan yang dibentuk oleh Kathy Matsui dengan tujuan kemajuan ekonomi perempuan akan meningkatkan ekonomi dan global, hal itu yang membuat Shinzo Abe merealisasikan *Womenomics* untuk negara Jepang. Kebijakan *Womenomics* di Jepang dilandasi oleh gagasan untuk membuat ekonomi lebih dinamis, terutama bagi perempuan yang ingin bekerja di perusahaan. Perdana Menteri Shinzo Abe mengakui bahwa partisipasi perempuan dalam perekonomian di Jepang relatif rendah dibandingkan negara maju lainnya.

## 2.2 Proses Kebijakan *Abenomics* ke *Womenomics*

Proses diterapkannya kebijakan ekonomi *Abenomics* adalah kebijakan yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe di tahun 2012. Dari kebijakan tersebut, konteks kebijakan *Womenomics* yang ada pada *Abenomics* adalah bagian dari Reformasi Struktural di mana *Womenomics* bukan hanya sekedar kebijakan yang sederhana tetapi transformasi peranan perempuan yang ada pada setiap sektor lingkungan kerja. Dalam kebijakan *Abenomics* terdapat unsur komponen yang disebut “*Third Arrow*” yang terdiri dari kebijakan stimulus moneter, kebijakan stimulus fiskal, kebijakan reformasi struktural. Unsur komponen tersebut untuk mempertimbangkan efek dari *Abenomics*.

*Abenomics* (アベノミクス) adalah kebijakan ekonomi yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe setelah pemilihan Perdana Menteri pada bulan Desember 2012. *Abenomics* awalnya ada selama periode pemilihan Shinzo Abe. Dalam kampanye untuk stagnasi ekonomi. Program ekonomi *Abenomics* yang di

sampaikan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe terdiri dari pelanggaran moneter, stimulasi fiskal dan Reformasi Struktural. Pada tiga komponen tersebut dinamakan sebagai “*Third Arrow*” atau arah dalam *Abenomics* (Eichengreen, 2013:5). Dalam *Abenomics*, politik sebagai bagian dari Reformasi Struktural ada dalam *Womenomics*. Reformasi Struktural yang ada pada salah satu komponen “*Third Arrow*”, bertujuan untuk meningkatkan potensi pertumbuhan PDB di Jepang dan Reformasi Struktural dapat dibuat lebih kredibel oleh Pemerintah Jepang dalam Kemitraan Trans Pasifik yang ditunjukkan untuk kesediaan dalam menangani kepentingan khusus (Deardoff Alan, 2013:638)

*Womenomics* adalah sebuah konsep yang menggambarkan bahwa meningkatkan dan memperkenalkan kembali perempuan ke sektor publik atau sektor tenaga kerja akan meningkatkan kekuatan ekonomi. Perempuan di dunia kerja dapat menjadi wujud kesetaraan gender dengan menciptakan gender dan berkembang sebagai upaya untuk menciptakan kesetaraan dan pemerataan secara harmonis. Tujuan utama dari kebijakan *Womenomics* adalah untuk meningkatkan proporsi tenaga kerja perempuan di Jepang guna mencapai percepatan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. *Womenomics* dapat menjadi solusi atas tantangan Jepang berupa resesi dan lesunya pertumbuhan ekonomi akibat krisis global. Faktor ini terus menurun seiring dengan melambatnya kemajuan produksi yang menjadi penyebab terjadinya pertumbuhan yang saling terkait dan saling terkait (<https://jurnalhiuns.files.wordpress.com/2016/04/jurnal-andrians-womenomics-kebijakan-pro-gender-2016.pdf>).

*Womenomics* bukan hanya sebuah kebijakan tetapi merupakan manifesto dalam mentransformasikan peran perempuan dalam memperbaiki sistem lingkungan kerja. Kantor Kabinet untuk Kesetaraan Gender dan temuan yang didukung penelitian Kathy menjelaskan bahwa peran perempuan akan memainkan banyak peran di Jepang, terutama dalam konteks ekonomi. Meningkatnya peran perempuan dapat membawa perbaikan ekonomi dan struktur sosial masyarakat. *Womenomics* adalah sebuah kebijakan untuk reformasi perempuan Jepang di tempat kerja di mana pemerintahan Shinzo Abe melalui *Womenomics*

akan fokus pada pemberdayaan wanita sebagai bagian dari solusi permasalahan ekonomi Jepang (Kathy Matsui et al, 2007:17).

*Womenomics* adalah kebijakan yang dikaitkan dengan tujuan meliberalisasi pasar seluas-luasnya tanpa ada sekat-sekat negara yang bertentangan dengan peran normatif negara dalam menciptakan regulasi di masyarakat untuk menciptakan masalah yang menghambat pertumbuhan dan perluasan pasar bebas. Perekonomian Jepang dapat dipegang melalui perdagangan hasil produksi yang masih mengalami tantangan tenaga kerja yang terus menerus merosot, dengan hal itu *Womenomics* dapat meningkatkan peranan perempuan untuk lebih mudah bekerja agar dapat membantu menjawab tantangan perusahaan-perusahaan dan kebutuhan tenaga kerja Jepang dalam menggerakkan roda pertumbuhan (Rapley John, 2007:112)

*Abenomics* merupakan proses kebijakan yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2012. Proses kebijakan tersebut merujuk pada tiga kebijakan yang disebut "*Third Arrow*" di antaranya kebijakan stimulus moneter, kebijakan stimulus fiskal dan kebijakan reformasi struktural. Salah satu dari tiga komponen tersebut terdapat politik pada bagian Reformasi Struktural yang ada dalam *Womenomics*. *Womenomics* merupakan sebuah konsep yang menggambarkan bahwa meningkatkan dan memperkenalkan kembali perempuan ke sektor publik atau sektor tenaga kerja akan meningkatkan kekuatan ekonomi. Konsep *Womenomics* pertama kali diperkenalkan oleh Kathy Matsui pada tahun 1999.

### **2.2.1 *Abenomics*: Reformasi Struktural Pertumbuhan**

Reformasi Struktural pada *Abenomics* merupakan strategi pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada "*Third Arrow*" di dalam *Abenomics*. Dalam hal ini Pemerintah Jepang mengambil langkah agar dapat memperkuat daya saing pada sektor ekonomi, berdasarkan strategi pertumbuhan ekonomi yang telah direncanakan di dalamnya.

*Abenomics* bertujuan untuk membantu Jepang merombak pada sektor ekonomi dan meningkatkan daya saing negara di pasar lokal dan internasional. Salah satu masalah utama dalam menghadapi perekonomian Jepang adalah

kurangnya tenaga kerja. Angka kelahiran di Jepang turun sekitar 6% dan negara tersebut diperkirakan akan kehilangan lebih dari sepertiga populasinya pada tahun 2010- 2060

(<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/economics/abenomics/>).

Beberapa Reformasi Struktural telah dilaksanakan, namun banyak yang akan memasuki tahap implementasi pada akhir tahun depan dan Reformasi struktural mungkin akan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melihat efeknya. Oleh karena itu, terlalu dini untuk mengkritik upaya Perdana Menteri Abe dalam melakukan Reformasi Struktural dan sulit untuk menilai hasilnya dalam jangka pendek. Strategi Pertumbuhan dan Rencana Pemulihan Ekonomi yang dirilis pada 24 Juni 2014 mencantumkan 10 bidang dengan berbagai kepentingan dan kualitas. Proposal ini dibagi menjadi tiga tema sebagai berikut:

1. Tema pertama dan terlengkap adalah meningkatkan profitabilitas bisnis (ROI – 投資収益率). Hal ini akan membutuhkan pajak perusahaan yang lebih rendah, tata kelola perusahaan yang lebih baik, restrukturisasi industri, inovasi, dan peningkatan pengembalian pensiun publik dan dana publik.
2. Tema kedua, perluasan sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan proposal seperti menggunakan perempuan dalam angkatan kerja, mereformasi gaya kerja perusahaan, dan lebih berhati-hati dalam menggunakan tenaga kerja asing.
3. Tema ketiga adalah reformasi dan restrukturisasi industri kunci. Ini termasuk reformasi di bidang pertanian, perawatan kesehatan dan perawatan, dukungan untuk pelatihan kembali usaha kecil dan menengah, dan revitalisasi ekonomi lokal  
(<https://www.scbri.jp/publication/geppo/20141201-post-415.html>).

Tujuan populasi jangka panjang Perdana Menteri Abe adalah untuk meningkatkan total populasi pada angka kelahiran menjadi 1,8 juta menjadi 1,42 juta untuk melonggarkan aturan-aturan yang menjadi penyedia layanan penitipan anak dan membuat perempuan menjadi lebih mudah untuk kembali bekerja setelah anak lahir. Ide dari Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bertujuan untuk mencegah jatuhnya penduduk di bawah 100 juta hingga 127 juta. Populasi Jepang

diperkirakan akan jatuh sekitar 87 juta di tahun 2060 (<https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/jepang-akan-tingkatkan-angka-kelahiran-untuk-dongkrak-ekonomi/3056129.html>).

Reformasi Struktural pertumbuhan pada *Abenomics* merombak sektor ekonomi yang ada di Jepang. Hal itu membuat Perdana Menteri Shinzo Abe menyampaikan strategi pertumbuhan dan ekonomi terhadap Jepang dengan mencantumkan 10 bidang dan proposal tersebut dibagi menjadi 3 tema. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat angka kelahiran dan mencegah jatuhnya penduduk Jepang.

### **2.2.2 Strategi Shinzo Abe untuk *Womenomics***

Sejak Shinzo Abe terpilih menjadi Perdana Menteri untuk kedua kalinya, Shinzo Abe menerapkan strategi dari kebijakan *Womenomics* dan menerapkan tiga kebijakan ekonomi untuk strategi dari kebijakan tersebut. Tujuan dari strategi tersebut dilakukan karena Jepang mengalami penurunan pada sektor ekonomi. Perdana Menteri Shinzo Abe juga menjelaskan bahwa perempuan dapat ikut berpartisipasi dalam dunia kerja agar dapat membantu perekonomian Jepang.

Perdana Menteri Shinzo Abe yang terpilih pada 26 Desember 2012, telah menjadikan pertumbuhan ekonomi Jepang dan penghapusan deflasi (penurunan harga) yang melanda Jepang selama bertahun-tahun sebagai prioritas utama Pemerintah Jepang. Perdana Menteri Shinzo Abe telah mengumumkan program reformasi ekonomi yang disebut "*Abenomics*" untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Strategi ini berfokus pada tiga komponen yang terdiri dari kebijakan moneter ekspansif, stimulus fiskal, dan Reformasi Struktural (Joshua K. Hausman, Johannes F. Wieland, 2015:385).

Shinzo Abe menyatakan bahwa bagian penting dari "*Third Arrow*" Reformasi Struktural akan berfokus pada "*Womenomics*" yaitu kebijakan yang mendorong partisipasi serta kemajuan perempuan dalam angkatan kerja Jepang. Dalam artikel Wall Street Journal September 2013, Abe mengemukakan potensi manfaat ekonomi yang dapat dicapai dengan mengeksplorasi "sumber daya Jepang yang paling jarang digunakan - wanita Jepang". Abe juga menekankan bahwa ada perlunya

melibatkan perempuan dalam angkatan kerja Jepang dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada September 2013. (<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/716/1/012103/pdf>)

Shinzo Abe melakukan pertemuan tahunan di Forum Ekonomi Dunia yang ada di Davos pada 22 Januari 2014 di mana Perdana Menteri Shinzo Abe menyatakan pada pidato utamanya sebagai berikut:

*...Japan's corporate culture, by contrast, is still one of pinstripes and button downs. After all, the female labour force in Japan is the most under-utilized resource. Japan must become a place where women shine. By 2020 we will make 30% of leading positions to be occupied by women. In order to have a large number of women become leading players in the market we will need a diverse working environment.*

(<https://www.gspublishing.com/content/research/en/reports/2014/05/29/163af1fc-35c0-47f6-b6bc-c3a9e378e020.pdf>)

Berdasarkan kebijakan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe ada beberapa pihak yang tidak percaya bahwa Pemerintah Jepang mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, termasuk masyarakat Jepang sendiri. Kebijakan yang akan diterapkan oleh Perdana Menteri Jepang yaitu kebijakan *Womenomics* dan pidato Shinzo Abe akan membantu dalam pertumbuhan Jepang di masa akan datang. Untuk membantu pertumbuhan Jepang, Pemerintah akan memanfaatkan sumber daya yang kurang di Jepang dengan cara memanfaatkan tenaga kerja perempuan.

Kebijakan dari strategi Shinzo Abe untuk *Womenomics* dengan mengumumkan reformasi ekonomi disebut *Abenomics*. Hal itu menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Jepang untuk meningkatkan ekonomi bagi Jepang khususnya dengan menempatkan perempuan Jepang di sektor publik. Pemerintah Jepang juga mendorong partisipasi dan kemajuan dalam angkatan kerja Jepang.

### **2.2.3 Hasil dari Agenda *Womenomics***

Agenda yang diterapkan oleh Shinzo Abe melalui kebijakan *Womenomics* adalah dengan memanfaatkan jumlah penduduk perempuan dari setengah populasi

penduduk Jepang saat ini. Hal ini dikarenakan pada agenda *Womenomics*, perempuan harus ikut berpartisipasi di dalam institusi nasional dan ekonomi agar dapat melindungi ekonomi Jepang. Untuk mempromosikan rencana tentang perempuan, Pemerintah Jepang perlu mempublikasikan perkembangan rencana tersebut agar perempuan di Jepang dapat bekerja di semua sektor.

Fokus agenda *Womenomics* berfokus pada partisipasi perempuan dalam institusi nasional dan ekonomi dalam melindungi bidang-bidang penting lainnya yang memengaruhi perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Namun terlepas dari kelemahan dan kekecewaan terhadap kebijakan, *Womenomics* mulai menerapkan kebijakannya dan mengubah sistem budaya patriarki yang ada di Jepang. Hal ini terbukti dengan adanya perluasan pengasuhan anak dan layanan lain yang dirancang untuk membantu orang tua, iklan yang menyertakan dan menargetkan ayah, dan penciptaan fitur khusus zona ekonomi dideregulasi dapat memungkinkan pekerja sosial asing masuk untuk memberikan perawatan bagi orang tua dan anak-anak dalam membantu perempuan kembali bekerja (Linda C. Hasunuma, 2015:100).

*Womenomics* tidak hanya untuk wanita, tetapi juga mencakup program untuk pria dan anak-anak yaitu: upaya untuk mengurangi jam kerja yang panjang dan mempromosikan pandangan baru tentang perawatan dan pekerjaan rumah bagi laki-laki, program setelah sekolah, dan taman kanak-kanak di daerah tersebut. Situs web dan kantor Dewan Pemerintah untuk Kesetaraan Gender telah mengubah bahasa kesetaraan gender menjadi perempuan dan laki-laki yang lebih inklusif untuk melibatkan laki-laki dalam prosesnya. Beberapa kampanye membahas kebutuhan laki-laki untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan berpartisipasi lebih aktif dalam pengasuhan anak, seperti inisiatif pemerintah "*Ikumen*" (Iis Muhayaroh, 2015:45).

Perempuan di Jepang sangat membutuhkan bantuan dalam mengasuh anak dan orang tua, karena semakin banyak perempuan yang bertahan pada karier mereka hal tersebut membuat Pemerintah Jepang telah menetapkan Zona Deregulasi untuk pekerja asing atas permintaan dari Kementerian Luar Negeri (Chanlett Avery dan Nelson, 2014:1-9). Banyak pengusaha yang mencoba untuk memenuhi permintaan yang meningkat dalam mengasuh anak dan mulai

menawarkan pengasuhan yang fleksibel bagi orang tua yang harus bekerja berjam-jam (Johnston, 2014:113)

Agenda *Womenomics* berfokus pada partisipasi perempuan dalam institusi nasional dan ekonomi dalam melindungi bidang-bidang yang bertujuan untuk mempengaruhi perempuan dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan adanya *Womenomics* berperan penting dalam membantu pertumbuhan ekonomi dengan mengikutsertakan perempuan ke dalam dunia kerja. *Womenomics* bukan hanya untuk membantu pertumbuhan ekonomi tetapi juga mengurangi jam kerja atau mempromosikan pandangan baru tentang pekerjaan rumah.

#### **2.2.4 Perekonomian Jepang sebelum Masa Kepemimpinan Shinzo Abe**

Jepang merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi Jepang mengalami pasang surut dari tahun ke tahun. Jepang juga mengalami masalah perekonomian yaitu mengalami kelambatan dari ekspor dan impor yang terganggu serta masalah ketenagakerjaan.

Pasca Perang Dunia II keberhasilan Jepang tidak lepas dari peran Amerika Serikat melalui bantuan pembangunan perekonomian nasional atau dikenal dengan *Marshall Plan*. Jepang juga bangkit dari keterpurukan yang didukung oleh dua faktor yaitu Doktrin Yoshida dan peran Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI). Doktrin Yoshida berisikan mengenai adanya kesediaan Jepang dalam pendanaan reparasi terhadap kerusakan perang dengan adanya penyerahan kegiatan militer yang sepenuhnya ada pada Amerika Serikat dan untuk sumber daya Jepang dialihkan untuk meningkatkan produktifitas negara dalam perdagangan Internasional

(<https://digitalcommons.kennesaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1164&context=jgi>).

Kemerosotan ekonomi Jepang mengalami penurunan dari PDB secara bertahap dari tahun 1980 turun dari 3,8% menjadi 1,6% pada tahun 1990, dan kembali menjadi 1% dari tahun 1990 hingga 1992. Krisis yang terjadi pada tahun 1991 hingga 2002 adalah dekade yang hilang bagi Jepang. Meski keadaan ekonomi

belum membaik, perbankan tetap memberikan pinjaman kepada perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan. (Naruki Mori, Shigenori Shiratsuka, and Hiroo Taguchi, 2001:54).

Tindakan yang memperpanjang masalah keuangan bagi pihak perusahaan dapat menimbulkan akumulasi kredit baru bagi pihak bank. Junichiro Koizumi yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang (2001-2006) di masa krisis yang telah berlangsung mulai merencanakan Reformasi struktural yang berfokus pada revitalisasi di sektor swasta. Perdana Menteri Koizumi juga mendorong privatisasi pada layanan dan mengurangi pengeluaran sosial yang diberlakukan pada tahun 2004 dengan mengurangi transfer dana dari Pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah sambil memberikan keleluasan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam menggunakan sisa dana (Charles Weathers, 2018:52)

Tahun 1980 Jepang mengalami penurunan ekonomi sekitar 3,8 % menjadi 1,6% di tahun 1990. Hal ini disebabkan oleh adanya dekade yang hilang pada negara Jepang. Meski ekonomi Jepang mengalami penurunan, hal ini tidak membuat bank yang ada di Jepang tidak memberikan pinjaman kepada perusahaan melainkan bank di Jepang membantu perusahaan tersebut untuk memberikan pinjaman meskipun keadaan ekonomi di Jepang saat itu mengalami penurunan. Di saat Jepang mengalami penurunan pada ekonomi, Junichiro Koizumi mulai merencanakan Reformasi Struktural yang akan merevitalisasi di sektor swasta.

### **2.2.5 Perekonomian Jepang Pada Masa Kepemimpinan Shinzo Abe**

Jepang merupakan salah satu negara dengan perekonomian yang kuat pada Restorasi Meiji, perubahan tersebut berlangsung pada masa kontemporer. Hal tersebut dipicu dengan adanya perombakan instrumen kebijakan pasar bebas di negara Jepang. Di tahun 2011 perekonomian Jepang menurun, hal itu membuat Shinzo Abe menerapkan kebijakan *Abenomics* pada Jepang.

Mengenai kondisi ekonomi yang dihadapi Jepang di bawah kepemimpinan Shinzo Abe ada dua faktor yang perlu ditekankan. Faktor pertama adalah tekanan internal. Tekanan ini terkait dengan masalah yang berasal dari Jepang seperti

populasi yang menua, krisis tenaga kerja dan kurangnya kesetaraan gender di angkatan kerja Jepang. Menurunnya angka kelahiran terus diiringi dengan peningkatan angka harapan hidup di Jepang. Pada tahun 2009 faktanya Jepang menduduki peringkat sebagai negara dengan populasi lansia tertinggi di dunia dengan angka 23% (<https://academic.oup.com/gerontologist/article/51/4/425/599276>)

Faktor kedua yaitu ketenagakerjaan perempuan juga menjadi yang mendasari munculnya tekanan domestik terhadap Pemerintahan Shinzo Abe. Terlepas dari adanya bidang ketenagakerjaan yang menghambat, namun faktanya pada fase melahirkan dapat menyebabkan hampir 76% pekerja di sektor ekonomi berhenti dari pekerjaannya secara teratur. Sebagian besar masyarakat Jepang percaya bahwa kebiasaan ini adalah hal yang wajar bagi wanita (Yanfei Zhou, 2015:109).

Dalam *Global Gender Gap Report 2012* yang dilakukan oleh WEF (*World Economic Forum*), Jepang menduduki peringkat ke-101 dalam hal partisipasi perempuan dalam perekonomian. Rendahnya peringkat yang disebabkan oleh rendahnya angka kelahiran di Jepang dan kurangnya partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan. Kemudian laporan lain dari Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan bahwa partisipasi dalam posisi kepemimpinan di Jepang relatif rendah yaitu 4% (<https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2012/>).

Ketenagakerjaan perempuan juga menjadi faktor yang mendasari munculnya tekanan domestik saat Perdana menteri Shinzo Abe memimpin. Fase melahirkan dapat menyebabkan tenaga kerja perempuan di sektor ekonomi akan terhenti dari pekerjaannya. Pada tahun 2012 dalam *Global Gap Report*, Jepang menduduki peringkat ke 101. Hal ini disebabkan oleh rendahnya angka kelahiran dan kurangnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja.

### **2.3 Womenomics**

*Womenomics* merupakan istilah yang diciptakan oleh Kathy Matsui pada tahun 1999. *Womenomics* diadopsi oleh Perdana Menteri Shinzo Abe yang bertujuan untuk mendorong perempuan ke dalam dunia pekerjaan dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jepang. *Womenomics* juga dapat membantu mengatasi rendahnya angka kelahiran dan populasi tua di Jepang.

Salah satu aspek *Womenomics* akan mendorong perempuan untuk bekerja adalah kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi modern Jepang telah lama bergantung pada tenaga kerja perempuan yang bekerja paruh waktu. Dilihat dari pondasi ekonomi pada modern Jepang saat ini, industri tekstil pada Jepang menjadi kunci industrialisasi serta pendapatan pada ekspor di Jepang dari tahun 1870 an hingga 1930 an yang sangat bergantung pada faktor tenaga kerja pada perempuan (Hunter, 2004:6; Tsurumi, 1992:21).

Dorongan argument mengenai *Womenomics* adalah untuk menekankan Negara Jepang agar merevitalisasikan tenaga kerja perempuan, mengatasi adanya tantangan demografis dan fisik hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, seperti Matsui et al. 2005: 1 mengatakan :

*We first wrote about “womenomics” back in 1999, and our conclusion has not changed. That is, out of economic necessity or as a result of lifestyle choices, an increasing proportion of Japanese women are actively participating in the workforce and becoming a very important source of income and consumption growth. While much more progress still needs to be made at both the public and private sector levels to foster greater female labor participation, we believe Japan is finally moving in the right direction.*

*Womenomics* adalah kebijakan yang menghubungkan tujuan untuk liberalisasi pada pasar tanpa hambatan terhadap negara yang bertemu dengan peran domestik normatif sebagai upaya untuk menciptakan peraturan publik untuk menghilangkan masalah yang menghambat pengembangan dan perluasan kebebasan pasar (Rapley, 2007:146).

Aspek yang mendorong *Womenomics* dengan adanya pertumbuhan ekonomi modern yang ada di Jepang bergantung pada tenaga kerja perempuan sementara atau paruh waktu. Pondasi ekonomi Jepang di era modern, industrialisasi serta pendapatan pada ekspor di Jepang salah satunya akan bergantung pada pendapatan perempuan yang bekerja secara paruh waktu. Dengan adanya hal tersebut membuat Jepang dapat merevitalisasikan tenaga kerja pada perempuan.

### 2.3.1 *Womenomics* dan Bisnis

Di Jepang, Perdana Menteri Shinzo Abe merealisasikan kebijakan *Womenomics* sebagai usaha untuk memajukan negara yang lebih maju. Di Jepang kontribusi perempuan dalam dunia kerja sangat diperlukan untuk kepentingan keragaman gender dalam hal pertumbuhan, khususnya dalam hal dunia bisnis yang ada di Jepang. Hal ini membuat perempuan di Jepang sangat didorong untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perempuan dalam dunia bisnis.

Anggota elit dari bisnis yang sangat bergantung pada saran dan dukungan LDP, juga ikut berpartisipasi dalam perubahan kebijakan ini. Pada tahun 2017, *Keidanren* setuju untuk membayar 300 miliar Yen (\$2,7 miliar) ke perusahaan-perusahaan untuk membantu negara agar dapat memperluas layanan penitipan anak atas permintaan Perdana Menteri Shinzo Abe. Pemerintah Jepang menginisiatif pengasuhan anak mengenai pendidikan untuk anak dan insiatif tersebut mengeluarkan biaya senilai 2 triliun Yen. Biaya tersebut akan dibayar sebagai kontribusi masyarakat dalam mempekerjakan karyawan di bawah sistem asuransi pensiun karyawan. Pasar modal juga telah mengambil alih, seperti ketika pada tahun 2018 Kode Tata Kelola Perusahaan yang dibentuk oleh Bursa Efek Tokyo dan Otoritas Jasa Keuangan direvisi untuk menetapkan bahwa setidaknya satu anggota Dewan perempuan seharusnya memegang posisi di setiap perusahaan yang terdaftar (<https://www.japantimes.co.jp/news/2017/12/01/national/japan-business-lobby-agrees-contribute-%C2%A5300-billion-expand-child-care-services/>).

Nikkei Asia juga ikut melaporkan pada bulan Desember 2020 bahwa “Perusahaan di Jepang akan didorong untuk menetapkan tujuan sukarela bagi perempuan dan manajer asing dan memberikan informasi tentang kemajuan mereka di bawah Kode Tata Kelola Perusahaan yang direvisi dan akan dirilis pada musim semi 2021. Kathy Matsui yang sebelumnya merefleksikan di tahun 2019 melaporkan tentang kemajuan *Womenomics* yang selama dua dekade sebelumnya, menunjukkan bahwa kepuasan dapat diukur dan dicapai dalam membantu mengubah pemimpin bisnis dan sikap masyarakat terhadap peran penting keragaman gender dalam pertumbuhan dan sementara Jepang masih jauh dari

pencapaiannya tujuan (<https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Japan-governance-code-to-urge-hiring-targets-for-women-and-foreign-bosses>).

*Keidanren* (Federasi Organisasi Ekonomi) merupakan asosiasi bisnis yang paling berpengaruh di Jepang. *Keidanren* diresmikan pada bulan Agustus tahun 1946 yang dihadiri sekitar 120 federasi asosiasi industri terbesar termasuk federasi besi dan baja Jepang, asosiasi produsen mobil Jepang dan asosiasi industri elektronik Jepang. *Keidanren* termasuk juga pusat kekuatan utama dalam bisnis “*Leader ship Zaikai*” dan untuk ketuanya telah diberi label “*The Prime Minister of Zaikai*” (Hyoek Mukarami dan Johannes Hirschmeier, 1979:64)

Dalam program kebijakan *Womenomics* yang diterapkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe, anggota elit bisnis yang ikut proses kebijakan tersebut bergantung pada saran LDP. Bursa Efek Tokyo dan Otoritas Jasa Keuangan bertugas dalam merevisi mengenai kontribusi masyarakat dalam ekonomi, Bursa Efek Tokyo dan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan setidaknya satu anggota Dewan perempuan seharusnya memegang posisi di setiap perusahaan yang terdaftar. Pada tahun 2019, Kathy Matsui mengungkapkan tentang kepuasan mengenai kemajuan *Womenomics* yang dapat mengubah pandangan masyarakat mengenai peran penting dalam kesetaraan gender di masa pertumbuhan Jepang.

### **2.3.2 *Womenomics* dan Mendorong Perempuan untuk Bersinar**

Peranan perempuan di Jepang sudah di mulai sejak permulaan perkembangan masyarakat. Setelah Perang Dunia II berakhir, Jepang mulai membicarakan mengenai hak-hak dan perlindungan pada perempuan di Jepang. Aktivisme feminis di Jepang berfokus pada kesetaraan di tempat kerja yang dapat mendorong perempuan untuk bersinar agar setara dengan laki-laki.

Pada 26 September 2013, Shinzo Abe berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana, menyatakan tujuan untuk mendorong *Womenomics* adalah untuk menciptakan masyarakat di mana wanita bersinar. Inti dari strategi retorisnya adalah gagasan bahwa mendorong perempuan untuk bersinar akan menerangi, seperti bola lampu, kekuatan pekerja perempuan untuk meningkatkan PDB nasional (AFP-JIJI, 2014: May 7).

Kathy Matsui, Kepala Strategi Ekuitas Jepang pada acara Goldman Sachs dan penemu istilah “*Womenomics*” mengemukakan hal yang menjadi dasar adanya *Womenomics* pada pembicaraan TED 2011 di Tokyo (2011). Kebijakannya tidak monolitik, tetapi para pengamat setuju bahwa dalam beberapa tahun terakhir kepemimpinan LDP yang dipimpin oleh Shinzo Abe telah mengantar ke tingkat baru kebangkitan ideologis konservatif. Pemerintahan sebelumnya telah berbicara tentang sistem kesejahteraan gaya Jepang berdasarkan tenaga kerja perempuan yang tidak dibayar dalam keluarga dan juga mendorong reformasi neo-liberal, tetapi selama era Shinzo Abe, feminisme dan politik negara menjadi baru, ketinggian dan konfigurasi (Ōsawa Mari, 2002; Miura, 2016b).

Kebijakan ini, yang disebut *Womenomics* yang didasarkan pada klaim bahwa mendorong perempuan untuk lebih berpartisipasi dalam perekonomian akan meningkatkan produk domestik bruto Jepang sebesar 12,5% (Matsui et al., 2014:5). Perempuan sangat dibutuhkan di pasar tenaga kerja untuk menghidupkan kembali ekonomi yang lesu tetapi mereka juga perlu memiliki lebih banyak anak untuk menghadapi krisis demografi masyarakat yang menua dengan cepat. Pada tahun 2012 Perdana Menteri Shinzo Abe berjanji untuk memajukan peningkatan peran perempuan di tempat kerja dengan tujuan menciptakan masyarakat yang di mana “*All women can Shine*” untuk strategis revitalisasi ekonomi yang ambisius dan rencana tersebut yaitu *Abenomics*. Strategi revitalisasi ekonomi Jepang dan peningkatan lapangan kerja perempuan merangkul gagasan *Womenomics* melalui perangkat kebijakan formal dan informal selama beberapa tahun terakhir (Jiyeoun Song, 2015:113).

Perdana Menteri Shinzo Abe menyatakan tujuan mendorong *Womenomics* adalah untuk menciptakan masyarakat khususnya perempuan agar bersinar di dunia kerja. Hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe pada 26 September 2013. Kathy Matsui selaku penemu *Womenomics* mengemukakan hal yang menjadi dasar adanya *Womenomics*. Perdana Menteri Shinzo Abe berjanji dengan adanya kebijakan tersebut membuat perempuan dapat bekerja lebih keras dari sebelumnya baik di luar rumah maupun sebaliknya.

## 2.4 Definisi Gender

Sebagai seorang individu yang hidup dalam masyarakat, perilaku manusia sering dipahami dan ditafsirkan berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan terjadi akibat proses yang disebabkan oleh banyak hal. Hal inilah yang menjadi penyebab awalnya ketidakadilan di masyarakat.

Istilah gender sering diidentikkan dengan gender, meskipun gender berbeda dengan gender dan sering dipahami sebagai anugerah dari Tuhan, namun sebenarnya gender lebih dari itu. Menurut Cixous di Tong (2004:41) gender dapat dipahami sebagai “Perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam nilai dan “perilaku” sedangkan menurut Kristeva dalam Tong (2004:42) bahwa gender adalah konsep budaya yang mengacu pada ciri-ciri biologis, perilaku, mental dan sosiokultural yang membedakan laki-laki dan perempuan.

Secara istilah, gender dapat diartikan sebagai harapan budaya bagi kaum laki-laki dan perempuan (Hilary M. Lips, 1993:4). Sejarah perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan terjadi sebagai akibat dari proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh banyak sebab, seperti kondisi sosial budaya, kondisi agama, dan kondisi lingkungan pemerintahan. Dengan proses yang panjang ini, perbedaan jenis kelamin seringkali dipandang sebagai pengaturan Tuhan yang bersifat biologis dan tidak dapat diubah. Inilah penyebab awal munculnya ketidakadilan di masyarakat. Di Jepang mereka berpendapat bahwa kata “gender” dimasukkan dalam teks yang sama dengan kata “gender” yaitu “*nature*”, sehingga perbedaan peran sosial tersebut tidak ada di Jepang di mana masyarakat melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Dengan adanya diskriminasi tersebut perbedaan antara laki-laki dan perempuan dianggap tidak adil (<https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2014/World-survey-on-the-role-of-women-in-development-2014-en.pdf>).

Gender merupakan ciri yang dapat dijadikan dasar untuk mendefinisikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan dapat dipersepsikan dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, psikologis dan emosional serta aspek lainnya. Gender merupakan konsep dimana antara laki-laki dan perempuan yang tidak dapat

diubah dikarenakan sudah diatur oleh Tuhan. Konsep gender dapat mencegah adanya diskriminasi yang selama ini sudah ada sejak dulu dan bersifat biologis. Di Jepang, perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan masih memiliki perbedaan sosial di mana Jepang masih kental dengan budaya patriarki.

## **2.5 Kesetaraan Gender**

Kesetaraan gender adalah salah satu isu yang menarik untuk diperbincangkan karena kesetaraan gender terkadang masih ada pro kontra dalam masyarakat umum mengenai persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender mempunyai persamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan agar dapat memperoleh hak-haknya yang sama dan setara sebagai manusia. Kesetaraan gender juga dapat menghapus adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan yang sudah ada sejak lama.

Menurut Soejipto dalam mengutamakan kebijakan Gender di Parlemen, Kajian DPR dan DPD (2010:86) kesetaraan gender adalah persamaan di mana laki-laki dan perempuan mempunyai syarat untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia sehingga dapat berperan dan berpartisipasi dalam kehidupan politik, hukum, dan sosial ekonomi, budaya - masyarakat, pendidikan dan pertahanan kegiatan, jaminan sosial (hankamnas) dan pemerataan pembangunan. Kesetaraan gender juga mencakup penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural terhadap laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan gender diabadikan dalam hukum hak asasi manusia internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Dokumen sejarah hak asasi manusia ini mengakui bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat yang sama dan hak-hak dan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini, tanpa diskriminasi apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan latar belakang. (<https://indonesiabaik.id/infografis/30-hak-asasi-manusia-dalam-deklarasi-universal-ham>)

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan dikenal sebagai tujuan gender karena didedikasikan untuk mencapainya.

Perubahan hukum dan legislatif perlu dipastikan untuk memastikan hak-hak perempuan di seluruh dunia. Sementara itu, 143 negara menjamin kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam konstitusinya, dan pada tahun 2014, tidak kurang dari 52 negara gagal mengambil langkah tersebut (<https://www.kemenpppa.go.id/>).

Di Jepang, Pemerintah mulai membuat tata cara untuk mempromosikan kesetaraan gender yang mereka buat sendiri yaitu *Danjo Kyodo Sankaku Suishin Jorei*. Dalam Undang-Undang dan peraturan baru di Jepang, kata kunci untuk *Danjo Kyodo Sankaku Suishin* adalah *Danjo Kyodo Sankaku* yang secara harfiah berarti partisipasi bersama dan perencanaan untuk laki-laki dan perempuan. *Danjo Kyodo Sankaku* merupakan terjemahan dalam bahasa Inggris yaitu kesetaraan gender. Penggunaan yang ditunjukkan dalam ungkapan samar dan asing pada *Danjo Kyodo Sankaku* adalah untuk menghindari istilah bahasa Jepang lebih umum, maka Pemerintah menggunakan arti yang lebih jelas yaitu *Byodo* (Ayako Kano, 2011: 43-45)

Kesetaraan gender adalah persamaan di mana laki-laki dan perempuan setara di bidang ekonomi, politik, sosial, hukum di mata masyarakat dan berhak atas hak yang dimilikinya tanpa adanya diskriminasi apapun baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Untuk mencapai kesetaraan gender perlu adanya perubahan hukum dan legislatif untuk memastikan hak-hak perempuan di seluruh dunia. Di Jepang untuk kesetaraan gender, pemerintah membuat dan menerapkan *Danjo Kyodo Sankaku* agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang.

## **2.6 Munculnya Gagasan Gender di Jepang**

Di Jepang, gagasan kesetaraan gender muncul setelah terjadinya ketidaksetaraan yang sudah ada dalam budaya patriarki. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya ketimpangan sosial pada perempuan yang meluas dalam masyarakat Jepang karena masyarakat Jepang menganggap perempuan sebagai makhluk yang kotor, hina dan tidak layak berada dalam lingkungan sosial, sehingga pada abad ke-17 Pemerintah Jepang mulai memunculkan gagasan kesetaraan gender

perempuan Jepang dapat berkontribusi dan berpartisipasi pada dinamisme peran dan status perempuan di Jepang pada setiap zaman.

Jepang adalah negara dengan budaya patriarki yang panjang. Misalnya gagasan tentang gender di Asia dan Jepang. Gagasan gender dalam budaya patriarki yang menciptakan ketidaksetaraan telah ada di Jepang selama berabad-abad, bahkan dengan penyebaran kepercayaan Jepang, yaitu *Shinto* dan Budha, ketidaksetaraan gender meluas di masyarakat Jepang selama Zaman Heian akhir (794-1185). Pada Zaman tersebut masyarakat percaya bahwa mengasosiakan pada perempuan dianggap najis dan keberdosaan yang tersebar luas (Naoko Takemaru, 2010:298).

Sistem feodal di Jepang sudah ada sejak pada abad ke-12 sampai ke pertengahan abad ke-19, yang ditandai dengan adanya kemunculan keluarga-keluarga aristokrat militer yang memiliki kekuasaan di daerah-daerah. Pada masa feodal awal, hak perempuan untuk mewarisi kekayaan dan perannya dalam sistem sosial politik ([https://www.academia.edu/25344143/Sejarah\\_Feodalisme](https://www.academia.edu/25344143/Sejarah_Feodalisme)).

Namun, peran dan posisi wanita terus menyusut hingga Zaman Edo di abad ke 17. Kondisi politik, sosial, dan ekonomi Jepang berkontribusi pada dinamisme peran dan status wanita Jepang di setiap era. Dinamika peran dan status perempuan Jepang juga mencerminkan kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan Jepang dalam kehidupannya hingga saat ini (<https://archive.org/details/thingsjapaneseb03chamgoog/page/n64/mode/2up?ref=ol&view=theater>).

Jepang memiliki sistem feodal yang sudah ada sejak abad ke 12. Gagasan gender yang muncul dalam budaya patriarki menciptakan ketidaksetaraan gender yang ada di Jepang sehingga pada Zaman Edo ekonomi Jepang semakin menurun dikarenakan peran perempuan di Jepang dianggap lemah dibandingkan laki-laki. Hal itulah yang membuat Pemerintah Jepang mengikutsertakan perempuan dalam dunia kerja pada setiap zaman.

## 2.7 Norma Kesetaraan Gender di Jepang

Jepang merupakan salah satu negara di mana masyarakat merasa sulit untuk berbicara tanpa memandang usia. Pemerintah Jepang sangat sulit untuk menerapkan sistem norma kesetaraan gender yang ada di Jepang dikarenakan Jepang menerapkan sistem patriarki yang bertolak belakang dengan norma kesetaraan gender di Jepang. Hal ini membuat kesetaraan gender di Jepang sangat jauh dibandingkan dengan negara maju lainnya. Untuk mencegah adanya ketidaksetaraan khususnya perempuan, Pemerintah Jepang menerapkan norma kesetaraan gender.

Jepang adalah negara yang menerapkan sistem patriarki, hal ini akan menyebabkan kesetaraan gender bertolak belakang jika dihubungkan dengan adanya sistem patriarki yang ada di Jepang. Tradisi yang ada di Jepang menjadikan sebuah kebijakan ketidaksetaraan gender yang mengakibatkan perempuan Jepang menghadapi sejumlah hambatan. Hal ini membuat Jepang lebih rendah dari negara maju lainnya yang dapat menyebabkan buruknya pengelolaan kesetaraan gender. Jepang mendapat perhatian dari internasional mengenai kondisi kesetaraan gender yang ada di Jepang seperti pada forum *UN's Gender Inequality Index, Social Watch's Gender Equity Index, and the World Economic Forum's Gender Gap Index*. Hal itu dikarenakan kondisi dimana kesetaraan gender di Jepang sangatlah jauh dibandingkan dengan negara maju lainnya hal itulah yang membuat Jepang mendapat perhatian dari forum-forum internasional. Namun, wanita Jepang dikatakan menduduki peringkat tertinggi dalam hal pendidikan, kemandirian finansial, kepribadian mandiri, kesehatan, dan angka kematian bayi yang rendah (Marshall, 2017:1)

Kondisi populasi penduduk Jepang dengan jumlah lansia yang tinggi ditambah dengan tingkat kelahiran yang rendah telah terjadi sejak Zaman Meiji tahun 1868. Hal ini berdampak besar pada situasi di negara tersebut. Negara dengan jumlah anak muda yang lebih sedikit dapat membuat orang pesimis dan memiliki persepsi yang rendah tentang nilai kemanusiaan. Peristiwa penurunan populasi ini terjadi di depan mata Jepang yang dapat mengekspos Jepang pada kekuatan suatu negara, ekonominya, dan standar hidupnya. Dengan demikian, dalam kasus seperti

itu, Jepang akan menjadi negara yang di mana populasi lansia akan dominan di karenakan perempuan yang belum menikah telah menjadi hal yang umum di Jepang (Funabashi, 2018:1).

Perempuan yang berpendidikan tinggi akan memiliki kondisi ekonomi yang baik, sehingga perempuan Jepang akan memilih untuk tidak menikah karena kebahagiaan seorang wanita dinilai dari tingkat pendidikan dan pendapatannya. Dengan kondisi tersebut, umumnya perempuan menghindari pernikahan karena kehidupan pernikahan di Jepang masih berdasarkan tradisi peran suami istri dalam keluarga, sehingga dapat dikatakan distribusi peran gender di Jepang masih asimetris. Namun di sisi lainnya, suami menginginkan istrinya tidak harus bekerja agar dapat mengurus anak-anaknya (Fukuda, 2013:107-116).

Negara Jepang memiliki sistem patriarki yang bertolak belakang dengan adanya kebijakan norma kesetaraan gender yang ada di Jepang saat ini. Hal yang mendasar bagi Pemerintah Jepang untuk menerapkan norma kesetaraan tersebut untuk mencegah adanya ketidaksetaraan khususnya bagi perempuan yang ada di Jepang. Meskipun Pemerintah Jepang sudah mulai menerapkan norma kesetaraan gender untuk perempuan, namun hal tersebut masih kurang dikarenakan semakin tinggi pendidikan dan tingkat ekonomi pada perempuan maka akan membuat perempuan di Jepang menghindari pernikahan. Hal ini disebabkan perempuan di Jepang takut tidak dapat mengimbangi antara pekerjaannya dengan mengurus anak di rumah.

## **2.8 Peran Wanita dalam Masyarakat Jepang**

Di negara Jepang, peran wanita sudah ada sejak abad ke 17. Peran wanita pada awal sejarah Jepang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kedudukan sosial ataupun politik, tetapi seiring berjalannya waktu kedudukan wanita dalam masyarakat Jepang berubah setelah adanya sistem feodal yang bertambah kokoh. Selama sistem modernisasi di Jepang berlangsung, Jepang mengalami kemajuan dalam bidang industri. Dalam kemajuan tersebut, Jepang memberikan perubahan terhadap struktur sosial.

Peran wanita dalam masyarakat Jepang telah berubah dari waktu ke waktu. Pada Zaman Edo (1603 - 1868) Jepang menutup negaranya dan tidak terbuka dengan budaya lainnya karena pada Zaman Edo diperintah oleh rezim feodal. Karena itu, konsep Konfusianisme secara jelas membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas yang sejalan dengan kondisi sosial pada saat itu (<https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/article/view/242322/166515>).

Pada periode berikutnya, Zaman Meiji (1868-1912), terjadi reformasi pemerintahan yang menghapuskan Keshogunan dan mengumumkan konstitusi serta menunjuk pemerintah untuk mengelola yang bertujuan untuk membangun Jepang agar setara dengan negara-negara Barat. Selain itu, Pemerintah Meiji mengumumkan Sistem Sekolah pada tahun 1872, gagasan dasar pendidikan untuk anak perempuan sekolah menengah saat itu yang berkomitmen untuk menciptakan "istri yang baik dan ibu yang bijaksana" (良妻賢母) (Saito, 2014:7).

Namun, memasuki abad ke-21, Jepang menghadapi berbagai masalah, termasuk resesi ekonomi. Masalah perubahan struktur demografi yang telah membuat Jepang menjadi masyarakat yang menua, memaksa Pemerintah Jepang menanggung biaya kesejahteraan yang signifikan, serta resiko kekurangan tenaga kerja di masa depan. Dalam situasi tersebut mendorong Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk mengumumkan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja, yang dikenal sebagai *Womenomics* yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan, kekurangan tenaga kerja di masa depan. Oleh karena itu, Abe bertujuan untuk menciptakan masyarakat Jepang yang di mana perempuan bisa dapat bersinar dalam dunia kerja melalui berbagai tindakan, termasuk mengubah Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk menciptakan kesempatan kerja yang setara, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perempuan yang kembali bekerja untuk dapat terus bekerja setelah melahirkan dan seterusnya (Abe, 2013).

Setelah menutup diri selama Zaman Edo, Jepang menyadari bahwa negaranya tertinggal dengan negara lainnya sehingga pada Zaman Meiji mereka mulai membuka diri untuk negara lain yang bertujuan agar dapat setara dengan negara di luar Jepang. Tetapi, setelah Jepang membuka diri untuk negara di luar Jepang,

Jepang memiliki masalah terhadap resesi ekonomi yang membuat perubahan terhadap stuktur demografi dan hal itulah yang membuat Perdana Menteri Shinzo Abe menciptakan kebijakan *Womenomics* untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan yang terjadi di masa depan.

## **2.9 Status dan Isu Kemajuan Politik Perempuan di Jepang Tahun 2022**

Di Jepang, isu mengenai kemajuan dan politik perempuan Jepang masih dipandang rendah oleh sebagian masyarakat. Sebagian masyarakat Jepang masih tidak peduli dan tidak tahu tentang kesetaraan gender mengenai peran penting perempuan dalam pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022 Jepang masih sangat tertinggal dalam bidang ekonomi dan politik hal ini yang membuat Jepang masih tertinggal dengan negara maju lainnya. Meskipun ada kenaikan sedikit tetapi hal itu menjadi sebuah kemajuan politik perempuan bagi negara Jepang.

Secara global, gerakan menuju kesetaraan gender tidaklah semuanya berhenti. Pada November 2021, Uni Eropa mengumumkan bahwa mereka untuk mencapai adanya kesetaraan gender pada 80% lebih kegiatan eksternal di tahun 2025. Dengan memobilisasi pendanaan sekitar €46 yang didukung lebih dari 130 negara, akan memberikan berbagai bidang termasuk dukungan untuk pendidikan anak perempuan dan peningkatan jumlah akses ke layanan kesehatan terhadap wanita (<https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20211130/pol/00m/010/004000c>).

Menurut basis Data Kouta Gender, pada bulan Agustus 2022, dari 136 negara di seluruh dunia memiliki beberapa sistem kouta. Presentase rata-rata dari parlemen perempuan yang ada di seluruh dunia dengan sistem ini sekitar 27,6%. Di Jepang belum ada yang mengenalkan sistem kuota untuk presentase anggota parlemen perempuan yang jauh dari angka tersebut (<https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas>).

Di bulan Juli 2022, presentase untuk anggota legislatif pada perempuan yang ada di Jepang kurang dari 10%. Hal ini membuat anggota DPR perempuan Jepang hanya 28%. Data tersebut dihasilkan dari pemilu yang digelar pada bulan Juli 2022 mendapatkan jumlah presentase anggota legislatif perempuan di mana presentase tersebut merupakan jumlah tertinggi yang pernah ada di Jepang. Meskipun

perubahan presentase terlihat sedikit demi sedikit, tetapi presentase tersebut masih kurang cukup. Dengan jumlah anggota DPR perempuan yang sangat sedikit dibandingkan dengan laki-laki, hal ini dikatakan sulit bagi perempuan untuk mengemukakan pendapat (<https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/211/giin.htm>).

Pada bulan Juli 2022 di presentase perempuan yang mengikuti pemilu untuk menduduki posisi parlemen di Jepang mengalami kenaikan sekitar 10%, Walaupun mengalami kenaikan, hal itu tetap membuat perempuan di Jepang sangat sulit untuk memasuki dunia politik. Presentase itu merupakan presentase tertinggi yang pernah ada di Jepang meskipun masih jauh dari negara-negara lainnya. Hal ini membuat perempuan di negara Jepang selangkah lebih maju untuk dapat masuk ke dalam dunia politik, walaupun masih sedikit dibandingkan dengan laki-laki dalam dunia politik Jepang yang masih didominasi oleh laki-laki.

Jepang adalah salah satu negara di mana peran perempuan dalam dunia pekerjaan masih sedikit dikarenakan masyarakat Jepang masih menganut sistem budaya patriarki. Pada tahun 2012, Perdana Menteri Shinzo Abe memperkenalkan *Womenomics* kepada masyarakat Jepang untuk menciptakan kesetaraan dan meningkatkan proporsi tenaga kerja pada perempuan di Jepang agar dapat mencapai pertumbuhan dan stabilitas ekonomi pada Jepang. Pada tahun 2022 isu tentang kemajuan perempuan di Jepang masih dipandang rendah oleh sebagian masyarakat Jepang karena ketidakpedulian dan ketidaktahuan masyarakat mengenai kesetaraan gender.